Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35305-35320

TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN

Irvan Alvharel Ginting Manik[1], Rotzami[2]

[1,2] Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Email: bestpart2882@gmail.com
Corresponding Author: Irvan Alvharel Ginting Manik, bestpart2882@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Badan Kesbangpol Kota Medan berdasarkan kerangka COBIT 2019 pada domain Governance (EDM) dan Management (APO), serta mengidentifikasi faktor penghambat dan kebutuhan perbaikan tata kelola TI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di Badan Kesbangpol Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap empat informan kunci yang dipilih secara purposif, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen organisasi dan bukti pengelolaan sistem informasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, triangulasi antara hasil wawancara dan dokumentasi, serta penarikan kesimpulan dengan mengacu pada indikator kapabilitas proses COBIT 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI secara umum berada pada kategori perlu perbaikan dengan rata-rata pencapaian sekitar 57,00 dari target 95,33, sehingga masih terdapat kesenjangan sekitar 38,33 dari level yang diharapkan. Domain Governance (EDM) dan Management (APO) secara keseluruhan berada pada Level 2 (Managed) batas bawah, dengan subdomain APO02 (Manage Strategy) memiliki capaian relatif lebih tinggi, sedangkan APO12 (Manage Risk) dan APO13 (Manage Security) menunjukkan gap terbesar karena belum adanya kebijakan formal, risk register, dan standar keamanan informasi yang komprehensif. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan tata kelola TI, manajemen risiko, dan keamanan informasi agar tata kelola TI Badan Kesbangpol Kota Medan lebih selaras dengan praktik terbaik COBIT 2019 serta menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan yang terarah.

Kata Kunci: *Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 2019, SPBE, Tingkat Kematangan, Kesbangpol*

ABSTRACT

This study aims to analyze the maturity level of IT governance at the Medan City National Unity and Political Agency based on the COBIT 2019 framework, focusing on the Governance (EDM) and Management (APO) domains, and to identify inhibiting factors and improvement needs in IT governance. The research employs a qualitative descriptive approach at the Medan City National Unity and Political Agency. Primary data were obtained through semi-structured interviews with four purposively selected key informants, while secondary data were derived from organizational documents and evidence of information system management. The data were analyzed through data reduction, data display, triangulation between interview results and documentation, and conclusion drawing, referring to COBIT 2019 process capability indicators. The findings indicate that the overall maturity level of IT governance is in the "needs improvement" category, with an average achievement of approximately 57.00 against a 95.33 target, leaving a gap of about 38.33 points from the expected level. Both the Governance (EDM) and Management (APO) domains are classified at the lower bound of Level 2 (Managed), with the APO02 (Manage Strategy) subdomain achieving a relatively higher level, while APO12 (Manage Risk) and APO13 (Manage Security) show the largest gaps due to the absence of formal policies, a comprehensive risk register, and established information security standards. These results underscore the need to strengthen IT governance policies, risk management, and information security so that IT governance at the Medan City National Unity and Political Agency is better aligned with COBIT 2019 best practices and can serve as a basis for targeted improvement recommendations.

Keywords: *Information Technology Governance, COBIT 2019, E-Government, Maturity Level, National Unity And Political Agency*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan asas otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan wajib yang memiliki peran strategis adalah urusan kesatuan bangsa dan politik karena berfungsi menjaga stabilitas masyarakat dan memperkuat persatuan nasional (Fahrurozi & Tuti, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan tersebut. Melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2020, Badan Kesbangpol Kota Medan memiliki tugas dalam deteksi dini konflik, penguatan ideologi, pembinaan wawasan kebangsaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta fasilitasi kehidupan demokrasi (Elviora & Prathama, 2025). Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan lapangan, serta pengumpulan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (Suryana & Lami, 2025).

Kota Medan memiliki karakteristik masyarakat yang beragam dengan dinamika sosial-politik yang kompleks. Kondisi ini menuntut Badan Kesbangpol memiliki sistem teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan data, mengolah informasi secara *real-time*, dan mendukung koordinasi antarinstansi dalam merespons isu strategis secara cepat dan terpadu (Komarudin dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang kuat agar pelaksanaan tugas selaras dengan kebijakan pemerintah mengenai pemerintahan berbasis digital (Anggraini dkk., 2025).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan instansi pemerintahan menerapkan layanan berbasis digital secara terintegrasi. Chairunisa dan Samboteng (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan SPBE harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, keterpaduan, keamanan, akuntabilitas, kesinambungan, dan interoperabilitas agar informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dalam mendukung tugasnya, Badan Kesbangpol Kota Medan telah menggunakan beberapa sistem teknologi informasi seperti Sistem Informasi Deteksi Dini (SIDINI), Sistem Informasi dan Penilaian Organisasi Kemasyarakatan (SEMPOA), serta laman resmi layanan publik untuk mengelola informasi strategis terkait kondisi sosial-politik dan organisasi kemasyarakatan.

Kompleksitas pengelolaan informasi strategis tersebut menuntut adanya pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI yang terstandar untuk memastikan kesesuaian proses dengan praktik terbaik. Daulay dkk. (2024) menyatakan bahwa pengukuran tingkat kematangan penting agar penerapan teknologi informasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga tata kelola strategis. Aleksi dan Afrina (2023) menambahkan bahwa tanpa pengukuran yang sistematis, organisasi akan kesulitan mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan standar yang diharapkan. Namun, hingga saat ini pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI di Badan Kesbangpol Kota Medan belum pernah dilakukan secara sistematis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan data, lambatnya respons terhadap isu keamanan, menurunnya akuntabilitas, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat (Kahfi, 2025).

Penelitian terkait tata kelola TI pada perangkat daerah bidang kesatuan bangsa dan politik juga masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada dinas komunikasi dan informatika atau layanan umum seperti *e-learning*, sistem akademik, dan administrasi kependudukan. Penelitian yang secara khusus mengukur tingkat kematangan tata kelola TI di Badan Kesbangpol Kota Medan menggunakan COBIT 2019, khususnya domain EDM (*Evaluate, Direct, and Monitor*) dan APO (*Align, Plan, and Organize*), belum ditemukan.

Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan berdasarkan kerangka COBIT 2019 pada domain EDM dan APO, sekaligus menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual dan praktik terbaik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam mendukung penyelenggaraan SPBE secara efektif dan akuntabel (Adam dkk., 2020). COBIT 2019 dipilih karena menyediakan kerangka tata kelola TI yang komprehensif, terstruktur, dan banyak digunakan di sektor publik (ISACA, 2019). Wijaya dkk. (t.t.) menjelaskan bahwa domain EDM dan APO relevan untuk menilai bagaimana

organisasi mengevaluasi, mengarahkan, memantau, merencanakan, dan mengelola sumber daya serta risiko teknologi informasi secara efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan COBIT 2019 pada perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta penyusunan rekomendasi perbaikan yang disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan berdasarkan *domain Governance* (EDM) dan *Management* (APO) pada kerangka kerja COBIT 2019."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual berdasarkan kondisi lapangan. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan proses, kendala, dan kebutuhan perbaikan secara naratif. Penelitian ini juga menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial melalui pengalaman manusia.

Penelitian dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dengan fokus pada penilaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka COBIT 2019, khususnya domain EDM (*Evaluate, Direct, and Monitor*) dan APO (*Align, Plan, and Organize*). Domain yang dianalisis meliputi EDM01, EDM02, EDM03, EDM04, APO02, APO12, dan APO13 yang berkaitan dengan tata kelola, manfaat TI, risiko, sumber daya, strategi, dan keamanan informasi.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam tata kelola TI dengan mengacu pada kerangka RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*). Informan meliputi pejabat bidang TI, administrator sistem, penanggung jawab keamanan TI, dan operator operasional. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, SOP, laporan insiden keamanan, *log* sistem, dan dokumen teknis lainnya.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai implementasi tata kelola TI, pembagian peran, prosedur operasional, serta kendala dan kebutuhan perbaikan. Penelitian juga didukung perangkat operasional seperti laptop, telepon genggam, dan alat tulis. Arikunto (2010) menyatakan bahwa instrumen penelitian membantu proses pengumpulan data agar hasil penelitian dapat diolah secara sistematis dan objektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen, administrator sistem, penanggung jawab keamanan TI, dan operator operasional untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dan praktik tata kelola TI berdasarkan domain EDM dan APO COBIT 2019. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan SOP tata kelola TI, *log* insiden keamanan, matriks hak akses, bukti audit, dan dokumen pemantauan tata kelola TI sebagai bahan verifikasi hasil wawancara.

Teknik analisis data mengacu pada Miles dkk. (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan memetakan indikator pada setiap domain COBIT 2019, menghitung tingkat pemenuhan aktivitas, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam level kapabilitas 0–5. Hasil tersebut dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan kondisi aktual dan standar COBIT 2019 serta ketentuan SPBE untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan perbaikan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi hasil wawancara, dokumen kebijakan, dan bukti implementasi teknis dengan mempertimbangkan dimensi *people*, *process*, dan *technology*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019, khususnya pada *domain Governance* (EDM) dan *Management* (APO). Nilai pada setiap proses *domain* EDM dan APO diperoleh dari penghitungan persentase pemenuhan aktivitas atau karakteristik proses yang telah ditetapkan dalam kerangka COBIT 2019.

Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah aktivitas yang terpenuhi dengan jumlah seluruh aktivitas pada proses yang bersangkutan, kemudian dikalikan seratus persen, dan diklasifikasikan ke dalam Level 0–5 sesuai kategori persentase yang telah dijabarkan pada Bab II serta prosedur analisis pada Bab III. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari pemaparan kondisi umum tata kelola TI, analisis setiap *subdomain* EDM dan APO, rekapitulasi tingkat kapabilitas, analisis kesenjangan terhadap praktik terbaik, hingga kesimpulan sementara dan rekomendasi awal perbaikan tata kelola TI di Badan Kesbangpol Kota Medan.

Kondisi Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Badan Kesbangpol Kota Medan

Tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan berkembang seiring meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap sistem informasi untuk mendukung kewaspadaan dini, pemantauan dinamika sosial-politik, dan pengelolaan data strategis. Pemanfaatan aplikasi seperti SIDINI dan SEMPOA menjadi bagian penting dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Medan.

Penelitian ini melibatkan empat informan kunci yang dipilih secara *purposive*, yaitu Kepala Badan, Sekretaris, pejabat yang membidangi teknologi informasi, dan tenaga teknis atau administrator sistem informasi. Berdasarkan wawancara pada 8 Januari 2026 di Kantor Kesbangpol Kota Medan, Kepala Badan, Andy Mario Siregar, menyatakan bahwa sistem informasi menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kewaspadaan dini karena data harus diperoleh secara cepat dan akurat. Oleh sebab itu, organisasi terus mendorong penguatan pengelolaan sistem meskipun belum seluruhnya dituangkan dalam aturan khusus terkait tata kelola TI.

Sekretaris Badan, Ody Dody Prasetyo, menjelaskan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan sistem informasi telah dijalankan berdasarkan struktur organisasi dan uraian tugas yang ada. Namun, pengelolaan tersebut belum dirumuskan secara khusus dalam dokumen kebijakan tata kelola TI yang terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Medan telah memiliki komitmen dalam memperkuat tata kelola TI dan mulai menerapkan praktik yang sejalan dengan prinsip COBIT 2019. Meskipun demikian, implementasinya masih berada pada tahap awal sehingga memerlukan penguatan melalui kebijakan tertulis, prosedur baku, dan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis.

Hasil Analisis *Domain Governance* (EDM) COBIT 2019

Bagian ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis tingkat kapabilitas proses pada *domain Governance* (EDM), yang meliputi EDM01, EDM02, EDM03, dan EDM04 sebagaimana didefinisikan dalam COBIT 2019. Setiap proses dinilai berdasarkan persentase pemenuhan aktivitas yang telah diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan ke dalam Level 0–5 sesuai kategori yang diuraikan pada Bab II.

EDM01 – *Ensure Governance Framework Setting and Maintenance*

Subdomain EDM01 berfokus pada penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola TI yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Berdasarkan dokumen perencanaan dan hasil wawancara, pengembangan teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah dimuat dalam Rencana Strategis (*Renstra*) dan Rencana Kerja (*Renja*) melalui program penguatan sistem informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Meskipun demikian, kerangka tata kelola TI belum disusun dalam dokumen khusus yang secara eksplisit mengacu pada struktur COBIT 2019. Pengaturan peran dan tanggung jawab masih dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan. Pimpinan berperan dalam pengambilan keputusan strategis, pejabat bidang TI/SPBE bertanggung jawab pada koordinasi operasional dan implementasi kebijakan, sedangkan tenaga teknis menjalankan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur sehari-hari.

Sosialisasi pengelolaan sistem dan tata kelola TI dilakukan melalui rapat koordinasi, arahan pimpinan, dan pendampingan langsung kepada pengguna. Namun, kegiatan tersebut belum

dilaksanakan dalam bentuk pelatihan terjadwal dengan materi khusus tata kelola TI sehingga dokumentasinya masih terbatas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Badan pada 7 Januari 2026 yang menyatakan bahwa sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui rapat dan pengarahan langsung ketika terdapat pengembangan atau perubahan aplikasi, belum dalam bentuk pelatihan formal terkait tata kelola TI.

.

Tabel 1. EDM01 – *Ensure Governance Framework Setting and Maintenance*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Kebijakan tata kelola TI disahkan	2	2	1	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Dokumentasi struktur peran dan tanggung jawab	2	2	2	2	2,00	66,67%	Level 3 (*Defined*)
Bukti sosialisasi/pelatihan	1	1	1	2	1,25	41,67%	Level 1 (*Performed*)
Rata-rata EDM01	1,67	1,67	1,33	2,00	**1,67**	**55,56%**	**Level 2 (*Managed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, indikator dokumentasi struktur peran dan tanggung jawab pengelolaan TI memperoleh persentase pemenuhan sebesar 66,67% dan berada pada Level 3 (*Defined*). Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian peran tata kelola TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah diatur dengan cukup jelas melalui struktur organisasi dan uraian tugas jabatan.

Indikator kebijakan tata kelola TI yang disahkan memperoleh persentase 58,33% dan berada pada Level 2 (*Managed*), yang menandakan bahwa tata kelola TI sudah dikelola, tetapi belum memiliki dokumen kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Sementara itu, indikator bukti sosialisasi atau pelatihan hanya mencapai 41,67% dan berada pada Level 1 (*Performed*), sehingga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tata kelola TI masih bersifat awal, belum terstruktur, dan belum memiliki dokumentasi yang memadai.

Secara keseluruhan, subdomain EDM01 memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 55,56% dan berada pada Level 2 (*Managed*). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola TI telah berjalan dan didukung pembagian peran yang cukup jelas, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dan distandardisasi sesuai karakteristik Level 3 (*Defined*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penyusunan dokumen kebijakan tata kelola TI yang komprehensif serta program sosialisasi dan pelatihan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.

EDM02 – *Ensure Benefits Delivery*

Subdomain EDM02 menekankan bahwa pemanfaatan TI harus mampu memberikan manfaat strategis bagi organisasi. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, sistem informasi digunakan untuk mendukung deteksi dini, pemetaan potensi konflik, pemantauan organisasi kemasyarakatan, serta penyusunan laporan pimpinan. Kepala Badan menjelaskan bahwa penggunaan sistem seperti SIDINI membuat informasi lapangan dapat diterima lebih cepat, lebih terstruktur, dan mempermudah pengambilan keputusan ketika muncul indikasi potensi konflik. Sebelumnya, laporan masih banyak dilakukan secara manual sehingga data sering tersebar dan kurang terorganisasi.

Hasil wawancara dengan pejabat yang membidangi TI menunjukkan bahwa pengukuran manfaat strategis TI belum diformalkan dalam bentuk indikator kinerja yang terukur dan terdokumentasi

secara rutin. Evaluasi manfaat masih dilakukan secara kualitatif melalui rapat kerja dan penilaian pimpinan. Shinthiya Ardita Pratiwi menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat indikator khusus atau target tertulis terkait manfaat TI. Penilaian manfaat lebih didasarkan pada pengalaman dan masukan pimpinan, misalnya ketika sistem dinilai mampu mempercepat proses pelaporan dalam rapat evaluasi.

Tabel 2. Hasil Penilaian EDM02 – *Ensure Benefits Delivery*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Program TI mendukung deteksi dini/pencegahan konflik	2	2	2	3	2,25	75,00%	Level 3 (*Defined*)
Indikator manfaat terdokumentasi	1	1	1	1	1,00	33,33%	Level 1 (*Performed*)
Bukti manfaat (laporan, rekam jejak)	2	2	1	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Rata-rata EDM02	1,67	1,67	1,33	2,00	**1,67**	**55,56%**	**Level 2 (*Managed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, indikator dukungan TI terhadap deteksi dini dan pencegahan konflik memperoleh skor rata-rata 75%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah memberikan manfaat strategis bagi organisasi. Sementara itu, indikator manfaat TI yang terdokumentasi secara formal hanya memperoleh skor 33,33%, sehingga menunjukkan bahwa pengukuran manfaat masih berada pada tahap awal dan belum memiliki dokumentasi yang memadai. Adapun indikator bukti manfaat berupa laporan dan rekam jejak memperoleh skor rata-rata 58,33% dan berada pada Level 2 (*Managed*).

Secara keseluruhan, subdomain EDM02 memperoleh rata-rata skor 55,56% dan berada pada Level 2 (*Managed*). Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TI telah dikelola dan mampu mendukung tugas kewaspadaan dini serta pelaporan organisasi. Namun, mekanisme formal untuk mengukur, mendokumentasikan, dan melaporkan manfaat TI secara berkala masih perlu diperkuat agar dapat mencapai karakteristik Level 3 (*Defined*).

EDM03 – *Ensure Risk Optimization*

Subdomain EDM03 berfokus pada pengelolaan risiko TI agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, kesadaran terhadap risiko TI telah terbentuk, terutama terkait potensi kebocoran data, gangguan sistem, dan kesalahan pengoperasian yang dapat memengaruhi stabilitas sosial-politik.

Muhammad Akbar Firdaus menjelaskan bahwa risiko utama yang diwaspadai adalah gangguan *server* dan akses tidak sah terhadap data. Untuk mengantisipasi hal tersebut, organisasi telah menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna, melakukan *backup* data secara berkala, serta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ketika terjadi gangguan layanan.

Meskipun langkah mitigasi telah berjalan, inventaris risiko TI dan rencana mitigasi formal belum disusun secara sistematis. Evaluasi berkala terhadap risiko TI juga belum dilakukan dalam bentuk laporan baku. Sekretaris Badan menyatakan bahwa pengelolaan risiko selama ini masih mengandalkan

pengalaman dan penanganan setelah kejadian terjadi, sehingga diperlukan penyusunan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur agar dapat dipantau secara berkala.

Tabel 3. Hasil Penilaian EDM03 – *Ensure Risk Optimization*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Inventaris risiko TI	1	1	1	2	1,25	41,67%	Level 1 (*Performed*)
Rencana mitigasi risiko	1	1	1	2	1,25	41,67%	Level 1 (*Performed*)
Bukti penerapan mitigasi	2	2	1	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Rata-rata EDM03	**1,33**	**1,33**	**1,00**	**2,00**	**1,42**	**47,22%**	**Level 1 (*Performed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3, indikator inventaris risiko TI dan rencana mitigasi masing-masing memperoleh persentase pemenuhan 41,67% dan berada pada Level 1 (*Performed*). Hasil ini menunjukkan bahwa identifikasi risiko dan perencanaan mitigasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah dilakukan, tetapi masih bersifat awal dan belum terdokumentasi secara lengkap dalam kerangka formal manajemen risiko TI.

Indikator bukti penerapan mitigasi memperoleh persentase 58,33% dan berada pada Level 2 (*Managed*), yang menunjukkan bahwa langkah mitigasi seperti pembatasan akses dan *backup* data telah dilaksanakan secara cukup konsisten, meskipun belum didukung kebijakan dan prosedur yang komprehensif.

Secara keseluruhan, subdomain EDM03 memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 47,22% dan dikategorikan pada Level 1 (*Performed*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko TI sudah mulai berjalan dan memberikan perlindungan dasar, tetapi belum memiliki sistem manajemen risiko TI yang terdokumentasi dan terstandardisasi sesuai karakteristik Level 2 (*Managed*) dan Level 3 (*Defined*). Oleh karena itu, diperlukan penyusunan daftar risiko TI yang lengkap, rencana mitigasi formal, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan risiko secara berkala agar kapabilitas proses EDM03 dapat meningkat dan selaras dengan prinsip COBIT 2019.

EDM04 – *Ensure* Resource *Optimization*

Subdomain EDM04 menilai tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya TI untuk mendukung tujuan organisasi. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, sumber daya TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi.

Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sumber daya TI dilakukan melalui mekanisme anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan TI telah diperhatikan dalam proses perencanaan organisasi.

Namun, evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya TI belum terdokumentasi secara khusus dalam bentuk laporan resmi, sehingga tingkat optimalisasi sumber daya belum dapat diukur secara jelas. Kasubbag yang membidangi TI menjelaskan bahwa evaluasi selama ini masih dilakukan secara internal ketika muncul kendala atau kebutuhan tambahan, sementara

laporan khusus mengenai efisiensi penggunaan perangkat dan pengelolaan sumber daya TI belum disusun secara formal.

Tabel 4. Hasil Penilaian EDM04 – *Ensure Resource Optimization*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Dokumen alokasi sumber daya TI	2	2	1	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Evaluasi penggunaan sumber daya	1	1	1	1	1,00	33,33%	Level 1 (*Performed*)
Bukti efisiensi	1	1	1	2	1,25	41,67%	Level 1 (*Performed*)
Rata-rata EDM04	**1,33**	**1,33**	**1,00**	**1,67**	**1,33**	**44,44%**	**Level 1 (*Performed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, indikator dokumen alokasi sumber daya TI memperoleh persentase 58,33% dan berada pada Level 2 (*Managed*), yang menunjukkan bahwa perencanaan dan alokasi sumber daya TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah dikelola melalui dokumen anggaran dan perencanaan kerja. Namun, indikator evaluasi penggunaan sumber daya hanya mencapai 33,33% dan indikator bukti efisiensi sebesar 41,67%, keduanya berada pada Level 1 (*Performed*). Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pemanfaatan sumber daya dan pengukuran efisiensi masih bersifat awal serta belum terdokumentasi secara formal.

Secara keseluruhan, subdomain EDM04 memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 44,44% dan berada pada Level 1 (*Performed*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya TI sudah berjalan dan mendukung tugas organisasi, tetapi belum didukung mekanisme evaluasi, pelaporan efisiensi, dan kebijakan optimalisasi yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan prosedur evaluasi penggunaan sumber daya TI, penyusunan indikator efisiensi, dan dokumentasi hasil evaluasi secara berkala agar kapabilitas proses dapat meningkat sesuai standar COBIT 2019.

Hasil Analisis *Domain Management* (APO) COBIT 2019

Subbagian ini menyajikan hasil pengukuran tingkat kapabilitas pada domain *Management* (APO) dalam kerangka COBIT 2019 yang mencakup proses APO02, APO12, dan APO13. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase pemenuhan aktivitas atau karakteristik proses, kemudian diklasifikasikan ke dalam Level 0–5 sesuai kategori pada Bab II dan prosedur analisis pada Bab III. Hasil pengukuran digunakan untuk menilai kondisi tata kelola strategi TI, manajemen risiko TI, dan keamanan informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan perbaikan pada setiap proses APO.

APO02 – *Manage Strategy*

Subdomain APO02 berfokus pada pengelolaan strategi TI agar selaras dengan tujuan organisasi. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, strategi pemanfaatan TI tercermin dalam dokumen *Renstra* dan *Renja* melalui program penguatan sistem informasi untuk mendukung kewaspadaan dini, pengelolaan konflik, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan. Sekretaris Badan menjelaskan bahwa usulan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi selalu dimasukkan dalam perencanaan tahunan sesuai kebutuhan tugas pokok organisasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang disesuaikan dengan prioritas program nasional dan daerah. Namun, dokumen khusus *IT Strategic Plan* yang komprehensif belum tersedia sebagai dokumen terpisah. Evaluasi strategi TI juga masih dilakukan melalui rapat kerja dan laporan kegiatan tanpa didukung indikator kinerja TI yang spesifik.

Tabel 5. Hasil Penilaian APO02 – *Manage Strategy*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Dokumen strategi TI	2	2	2	2	2,00	66,67%	Level 3 (*Defined*)
Dokumen rencana implementasi	1	2	2	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Bukti implementasi	2	2	1	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Rata-rata APO02	**1,67**	**2,00**	**1,67**	**2,00**	**1,83**	**61,11%**	**Level 2 (*Managed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, indikator dokumen strategi TI memperoleh persentase 66,67% dan berada pada Level 3 (*Defined*), yang menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah dituangkan dalam dokumen perencanaan for mal. Sementara itu, indikator dokumen rencana implementasi dan bukti implementasi masing-masing memperoleh persentase 58,33% dan berada pada Level 2 (*Managed*), yang menandakan bahwa pelaksanaan program TI telah dikelola tetapi belum distandardisasi sepenuhnya dan belum didukung indikator kinerja yang terukur.

Secara keseluruhan, subdomain APO02 memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 61,11% dan berada pada Level 2 (*Managed*). Hal ini menunjukkan bahwa strategi TI telah terintegrasi dalam perencanaan organisasi, namun belum diformalkan dalam dokumen strategi TI yang komprehensif dan belum dilengkapi mekanisme pemantauan berbasis indikator kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dokumen strategi TI tersendiri, penetapan indikator kinerja TI, dan evaluasi berkala agar kapabilitas proses dapat meningkat menuju Level 3 (*Defined*) sesuai COBIT 2019.

APO12 – *Manage Risk*

Subdomain APO12 membahas pengelolaan risiko TI pada tingkat manajerial, termasuk prosedur formal dan integrasinya dengan manajemen risiko organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan kesadaran terhadap risiko TI sudah ada, tetapi prosedur manajemen risiko TI yang terdokumentasi secara khusus belum tersedia.

Penanganan insiden, seperti gangguan sistem dan potensi pelanggaran keamanan, masih dilakukan melalui koordinasi langsung dan pelaporan lisan kepada pimpinan. Catatan insiden juga belum disusun dalam format *log* yang baku sehingga proses evaluasi dan pembelajaran dari insiden sebelumnya belum optimal. Selain itu, integrasi risiko TI ke dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih terbatas.

Tenaga Ahli bidang TI menjelaskan bahwa penanganan gangguan selama ini dilakukan dengan memeriksa penyebab teknis, melapor kepada atasan, dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan apabila diperlukan. Namun, belum terdapat SOP tertulis khusus manajemen risiko TI sehingga proses penanganan masih mengikuti kebiasaan yang berjalan dan belum memiliki prosedur maupun evaluasi tertulis yang terstandarisasi.

Tabel 6. Hasil Penilaian APO12 – *Manage Risk*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Prosedur manajemen risiko TI	1	1	1	2	1,25	41,67%	Level 1 (*Performed*)
Bukti implementasi prosedur	1	1	1	2	1,25	41,67%	Level 1 (*Performed*)
Bukti evaluasi risiko	1	1	0	1	0,75	25,00%	Level 1 (*Performed*)*
Rata-rata APO12	**1,00**	**1,00**	**0,67**	**1,67**	**1,08**	**36,11%**	**Level 1 (*Performed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, indikator prosedur manajemen risiko TI dan bukti implementasi prosedur masing-masing memperoleh persentase 41,67% dan berada pada Level 1 (*Performed*). Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah dilakukan, tetapi belum diformalkan dalam prosedur tertulis dan dokumentasi yang lengkap. Indikator bukti evaluasi risiko memperoleh persentase 25,00% dan juga berada pada Level 1 (*Performed*), yang menandakan bahwa evaluasi risiko masih dilakukan secara sporadis dan belum menjadi mekanisme evaluasi yang terjadwal.

Secara keseluruhan, subdomain APO12 memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 36,11% dan dikategorikan pada Level 1 (*Performed*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko TI masih bersifat praktis dan dilakukan ketika insiden terjadi, namun belum didukung prosedur formal, dokumentasi memadai, dan evaluasi yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan SOP manajemen risiko TI, pengembangan *log* insiden dan *risk register*, serta integrasi risiko TI ke dalam SPIP dan evaluasi rutin agar kapabilitas proses dapat meningkat menuju Level 2 (*Managed*) sesuai COBIT 2019.

APO13 – *Manage Security*

Subdomain APO13 berfokus pada pengelolaan keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, beberapa kontrol keamanan telah diterapkan, seperti pembatasan akses ruang *server*, pengaturan hak akses pengguna berdasarkan peran, serta pelaksanaan *backup* data secara berkala.

Kasubbag yang membidangi TI menjelaskan bahwa setiap pegawai memiliki *username* dan *password* sesuai tugasnya sehingga tidak semua pengguna dapat mengakses data yang sama. Akses ke ruang *server* juga dibatasi hanya untuk petugas tertentu. Meskipun praktik keamanan tersebut sudah dijalankan, dokumen kebijakan keamanan informasi masih dalam bentuk *draft*. Selain itu, pelatihan khusus keamanan informasi belum dilaksanakan secara rutin dan hanya disisipkan dalam sosialisasi penggunaan aplikasi. Pencatatan insiden keamanan juga masih sederhana serta belum menggunakan format *log* dan evaluasi tertulis yang baku.

Tabel 7. Hasil Penilaian APO13 – *Manage Security*

Indikator	Kepala	Kasubbag	Sekretaris	Tenaga Ahli	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Level COBIT
Standar keamanan informasi	1	2	1	2	1,50	50,00%	Level 2 (*Managed*)
Prosedur keamanan	2	2	1	2	1,75	58,33%	Level 2 (*Managed*)
Bukti penerapan keamanan	2	2	1	3	2,00	66,67%	Level 3 (*Defined*)
Rata-rata APO13	**1,67**	**2,00**	**1,00**	**2,33**	**1,75**	**58,33%**	**Level 2 (*Managed*)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 7, indikator standar keamanan informasi memperoleh persentase 50,00% dan berada pada Level 2 (*Managed*), yang menunjukkan bahwa prinsip dasar keamanan informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya dituangkan dalam kebijakan tertulis yang komprehensif. Indikator prosedur keamanan memperoleh persentase 58,33% dan juga berada pada Level 2 (*Managed*), menandakan bahwa pengelolaan akses dan akun pengguna telah dilakukan secara konsisten meskipun belum terdokumentasi sebagai SOP formal.

Sementara itu, indikator bukti penerapan keamanan mencapai 66,67% dan berada pada Level 3 (*Defined*), yang menunjukkan bahwa kontrol keamanan seperti pengaturan hak akses dan pembatasan akses ruang *server* telah diterapkan secara relatif terstandar dan dapat dibuktikan melalui dokumentasi implementasi.

Secara keseluruhan, subdomain APO13 memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 58,33% dan dikategorikan pada Level 2 (*Managed*). Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan informasi telah dikelola dan diterapkan dalam praktik, tetapi masih memerlukan penguatan melalui kebijakan keamanan informasi tertulis, program *security awareness* yang terjadwal, serta mekanisme pencatatan dan evaluasi insiden keamanan yang lebih sistematis. Penyusunan SOP keamanan, *log* insiden yang baku, dan pelatihan berkala diperlukan agar kapabilitas proses dapat meningkat menuju Level 3 (*Defined*) sesuai rekomendasi COBIT 2019.

Tingkat Kapabilitas *(Capability Level)* Proses Tata Kelola Teknologi Informasi

Rekapitulasi Tingkat Kematangan per Sub*domain*

Tabel 8. Rekapitulasi Tingkat Kematangan per Sub*domain* COBIT 2019

Sub*domain*	Deskripsi	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Tingkat Kapabilitas	Kategori
EDM01	*Ensure Governance Framework* Setting and Maintenance	1,67	55,56%	Level 2	*Managed*
EDM02	*Ensure Benefits Delivery*	1,67	55,56%	Level 2	*Managed*
EDM03	*Ensure Risk Optimization*	1,42	47,22%	Level 1	*Performed*

Sub*domain*	Deskripsi	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Tingkat Kapabilitas	Kategori
EDM04	*Ensure* Resource *Optimization*	1,33	44,44%	Level 1	*Performed*
Rata-rata *Domain* EDM		**1,52**	**50,69%**	**Level 2**	***Managed* (batas bawah)**
APO02	*Manage Strategy*	1,83	61,11%	Level 2	*Managed*
APO12	*Manage Risk*	1,08	36,11%	Level 1	*Performed*
APO13	*Manage Security*	1,75	58,33%	Level 2	*Managed*
Rata-rata *Domain* APO		**1,55**	**51,85%**	**Level 2**	***Managed* (batas bawah)**
Rata-rata Keseluruhan		**1,54**	**51,27%**	**Level 2**	***Managed* (awal)**

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 8, subdomain APO02 (*Manage Strategy*) memperoleh persentase pemenuhan tertinggi sebesar 61,11% dan berada pada Level 2 (*Managed*). Hasil ini menunjukkan bahwa strategi TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan organisasi, meskipun belum diformalkan dalam dokumen strategi TI yang komprehensif dan belum didukung indikator kinerja yang spesifik.

Sebaliknya, subdomain APO12 (*Manage Risk*) memperoleh persentase terendah sebesar 36,11% dan berada pada Level 1 (*Performed*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko TI masih dilakukan secara praktis tanpa prosedur formal, dokumentasi memadai, dan evaluasi yang terstruktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek strategi TI lebih berkembang dibandingkan manajemen risiko TI.

Secara keseluruhan, rata-rata domain EDM memperoleh persentase 50,69% dan domain APO sebesar 51,85%, keduanya berada pada Level 2 (*Managed*). Nilai ini menunjukkan bahwa proses tata kelola TI pada aspek *governance* dan *management* telah dijalankan dan mulai terdokumentasi, tetapi belum sepenuhnya distandardisasi dan dimonitor secara konsisten.

Tata kelola teknologi informasi secara umum memperoleh skor rata-rata 1,54 atau persentase pemenuhan 51,27% yang dikategorikan pada Level 2 (*Managed*). Hal ini menunjukkan bahwa proses utama tata kelola TI telah dikenali dan diterapkan, tetapi dokumentasi, standardisasi, pemantauan, dan evaluasi masih perlu diperkuat agar dapat mencapai Level 3 (*Defined*) sesuai kerangka COBIT 2019. Selain analisis per subdomain, penelitian juga menilai persepsi masing-masing informan untuk melihat variasi pandangan terhadap tata kelola TI di setiap level organisasi.

Tabel 9. Perbandingan Rata-rata Penilaian antar Informan

Informan	Jabatan	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Perspektif Utama
Informan 1	Kepala Badan	1,48	49,33%	Strategis, fokus pada arah dan manfaat TI
Informan 2	Kasubbag/Kabid	1,57	52,33%	Operasional-manajerial

Informan	Jabatan	Rata-rata Skor	Persentase Pemenuhan	Perspektif Utama
Informan 3	Sekretaris	1,14	38,00%	Koordinatif, cenderung lebih konservatif
Informan 4	Tenaga Ahli TI	2,05	68,33%	Teknis, lebih optimis terhadap implementasi

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Perbedaan skor rata-rata pada Tabel 9 menunjukkan adanya variasi pemahaman dan ekspektasi informan terhadap tata kelola TI di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Tenaga Ahli TI memperoleh persentase pemenuhan tertinggi, yaitu sekitar 68,33%, yang mencerminkan pandangan lebih optimis karena terlibat langsung dalam implementasi kontrol teknis dan merasakan manfaat operasional TI dalam kegiatan sehari-hari.

Sebaliknya, Sekretaris Badan memberikan persentase terendah, sekitar 38,00%, yang menunjukkan perspektif koordinatif yang lebih konservatif serta penilaian bahwa masih banyak aspek tata kelola TI yang perlu diperkuat. Sementara itu, Kepala Badan dan Kasubbag/Kabid memperoleh nilai pada kisaran 49–52%, yang menandakan bahwa tata kelola TI dinilai sudah berjalan pada level strategis dan operasional-manajerial, tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan, terutama dalam aspek dokumentasi kebijakan, pengukuran manfaat, dan manajemen risiko TI.

Analisis *Gap* Tingkat Kematangan terhadap Praktik Terbaik COBIT 2019

Tabel 10. Analisis *Gap* per Sub*domain* terhadap Target COBIT 2019

Sub*domain*	Kondisi Saat Ini (As-Is)	Target (To-Be)	*Gap* (%)	Prioritas Perbaikan
EDM01	55,56% – Level 2 (*Managed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	27,77%	Tinggi
EDM02	55,56% – Level 2 (*Managed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	27,77%	Tinggi
EDM03	47,22% – Level 1 (*Performed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	36,11%	Sangat Tinggi
EDM04	44,44% – Level 1 (*Performed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	38,89%	Sangat Tinggi
APO02	61,11% – Level 2 (*Managed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	22,22%	Sedang
APO12	36,11% – Level 1 (*Performed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	47,22%	Kritis
APO13	58,33% – Level 2 (*Managed*)	83,33% – Level 3 (*Defined*)	25,00%	Tinggi

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa sub*domain* APO12 (*Manage Risk*), EDM03 (*Ensure Risk Optimization*), dan EDM04 (*Ensure* Resource *Optimization*) memiliki *Gap* yang paling besar sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Untuk memperjelas arah perbaikan, kesenjangan tersebut dipetakan lebih lanjut berdasarkan dimensi *people*, *process*, dan *technology*.

Tabel 11. Pemetaan Gap Tingkat Kematangan dengan Dimensi *People–Process –Technology*

Dimensi	Temuan *Gap* Utama	Dampak Utama	Arah Rekomendasi
People	Kompetensi tata kelola TI belum merata, ketergantungan pada personel kunci	Risiko single point of failure, inkonsistensi	Pelatihan, sosialisasi, dan knowledge transfer

Dimensi	Temuan *Gap* Utama	Dampak Utama	Arah Rekomendasi
Process	SOP belum lengkap, belum mencakup siklus PDCA, evaluasi tidak rutin	Kesulitan monitoring dan improvement berkelanjutan	Penyusunan kebijakan dan SOP formal, audit internal
Technology	Infrastruktur memadai namun monitoring terbatas, backup belum teruji	Risiko gangguan layanan dan kehilangan data	Penguatan tools keamanan dan rencana pemulihan

Sumber: Rekap instrumen penilaian tata kelola TI, diolah peneliti, 2026.

Analisis pada tabel 11 ini menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola TI tidak hanya terkait aspek teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kedewasaan proses internal. Upaya perbaikan perlu dirancang secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut.

Kesimpulan Sementara dan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola TI

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan secara umum telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam deteksi dini dan pengelolaan informasi strategis. Kondisi ini terlihat dari tingkat kematangan pada subdomain yang berkaitan dengan strategi dan manfaat TI yang berada pada Level 2 (*Managed*). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan TI sudah dikelola dan mulai mendukung kebutuhan organisasi secara operasional.

Secara keseluruhan, tingkat kematangan tata kelola TI berada pada kisaran Level 1–2 (*Initial–Managed*). Artinya, proses tata kelola TI telah dikenali dan dijalankan, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi, distandardisasi, dan dievaluasi secara berkala. Kesenjangan terbesar ditemukan pada subdomain yang berkaitan dengan manajemen risiko dan optimalisasi sumber daya, khususnya APO12, EDM03, dan EDM04. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengelolaan risiko TI, evaluasi sumber daya, dan mekanisme pengendalian masih memerlukan penguatan agar lebih terstruktur dan terukur.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar informan mengenai tata kelola TI. Tenaga teknis cenderung menilai bahwa kontrol dan praktik pengelolaan telah banyak diterapkan, sedangkan pihak manajerial menilai bahwa aspek kebijakan, dokumentasi, dan evaluasi formal masih perlu diperkuat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan tata kelola TI yang tidak hanya berfokus pada aspek *technology*, tetapi juga memperhatikan dimensi *people* dan *process*.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan kebijakan dan kerangka tata kelola TI melalui penyusunan dokumen kebijakan yang komprehensif dan selaras dengan regulasi SPBE. Selain itu, manajemen risiko TI perlu dikembangkan secara sistematis melalui penyusunan *risk register*, mekanisme mitigasi, dan integrasi dengan SPIP. Optimalisasi sumber daya TI juga perlu dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap pemanfaatan infrastruktur, investasi, dan kebutuhan SDM. Di samping itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi terkait tata kelola TI, manajemen risiko, dan keamanan informasi perlu dilaksanakan secara rutin untuk mendukung penguatan tata kelola TI secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan menggunakan kerangka COBIT 2019 pada domain *Governance* (EDM) dan *Management* (APO), diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola TI secara umum masih berada pada kategori perlu perbaikan. Rata-rata tingkat kapabilitas mencapai sekitar 57,00% dari target 95,33%, sehingga masih terdapat kesenjangan sekitar 38,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses tata kelola TI telah berjalan dan mulai terkelola, tetapi belum sepenuhnya didukung dokumentasi, standardisasi, dan mekanisme evaluasi yang menyeluruh sesuai praktik terbaik COBIT 2019.

Pada domain *Governance* (EDM), subdomain EDM01 dan EDM04 menunjukkan bahwa kerangka tata kelola, pembagian peran, dan pengelolaan sumber daya TI telah dijalankan melalui struktur organisasi, uraian tugas, serta mekanisme perencanaan anggaran. Namun, pelaksanaannya belum didukung dokumen kebijakan tata kelola TI yang komprehensif, indikator kinerja, dan laporan evaluasi yang baku. Sementara itu, subdomain EDM02 dan EDM03 memperlihatkan bahwa pemanfaatan TI telah memberikan manfaat strategis dalam mendukung kewaspadaan dini dan pengelolaan informasi sosial-politik. Meskipun demikian, pengukuran manfaat dan pengelolaan risiko TI masih bersifat kualitatif dan belum dilengkapi indikator terukur, *risk register*, maupun rencana mitigasi yang terdokumentasi.

Pada domain *Management* (APO), subdomain APO02 (*Manage Strategy*) memiliki tingkat kapabilitas yang relatif lebih baik dan mendekati target karena arah strategis pemanfaatan TI mulai diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan *Renstra* Kesbangpol. Sebaliknya, subdomain APO12 (*Manage Risk*) dan APO13 (*Manage Security*) masih berada pada tingkat kapabilitas rendah. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumentasi menyeluruh mengenai risiko operasional TI, prosedur respons insiden, dan standar keamanan informasi yang terintegrasi. Akibatnya, pengelolaan risiko dan keamanan TI masih sangat bergantung pada pengalaman tenaga teknis dan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Analisis kualitatif menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dalam mendorong pemanfaatan TI untuk kewaspadaan dini, penggunaan aplikasi SIDINI dan SEMPOA, serta penerapan pembatasan hak akses dan *backup* data berkala menjadi kekuatan utama tata kelola TI di Badan Kesbangpol Kota Medan. Namun, kelemahan utama masih terdapat pada aspek formalisasi kebijakan, pengukuran manfaat, pengelolaan risiko, dan keamanan informasi. Kondisi tersebut menyebabkan tata kelola TI belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan keamanan pengelolaan informasi strategis sesuai prinsip SPBE dan standar COBIT 2019.

REFERENCES

Adam, W., Budi Agung, R., & Komarudin, D. (2020). Menghitung tingkat kematangan tata kelola TI memakai framework ITIL V.3 (Studi kasus: PT Wijaya Karya).

Aleksi, A., & Afrina, M. (2023). Pengukuran tingkat kematangan layanan TI pada UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya menggunakan framework COBIT 2019. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN).* https://doi.org/10.26418/justin.v11i3.58520

Anggraini, N., Putra, R., & Hidayat, B. A. (2025). Inovasi digital dalam pemerintahan: Pengaruh SICARAM terhadap kinerja perangkat daerah. *Matra Pembaruan, 9*(1), 45–59. https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.45-59

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (15th ed.). PT Rineka Cipta.

Chairunisa, F., & Samboteng, L. (2024). Prinsip-prinsip digitalisasi layanan *inpassing* dosen non-ASN lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah IX. *Jurnal Administrasi Negara.*

Daulay, M. D., Dewi, F., & Praditya, D. (2024). Analisis tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 2019 pada PT Nusantara Turbin dan Propulsi. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 9*(2), 595–602. https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.4537

Elviora, M., & Prathama, A. (2025). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam penerimaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi masyarakat. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research.*

Fahrurozi, & Tuti, R. (2020). Efektivitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 5.*

ISACA. (2019). *COBIT 2019 framework governance and management objectives.*

Kahfi, Z. (2025). Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. *E-Journal IPDN.*

Komarudin, D., Sulton, Junita Praja, S., Setiawan, S., & Ruhana, F. (2025). Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai instrumen inovasi pemerintah daerah dalam menjamin

ketahanan pangan berkelanjutan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*.
Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*.
Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ke-2, Vol. Ke-24). Alfabeta.
Suryana, E., & Lami, S. (2025). Kebijakan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Donggala. *Jurnal FISIP JSPSR*.
Wijaya, C., Sukamto, M., & Yunis, R. (t.t.). Audit tata kelola TI menggunakan COBIT 2019 domain APO-12 pada Universitas Mikroskil. *Jurnal SIFO Mikroskil (JSM), 24*(2), 1–5. https://doi.org/10.55601/jsm.24i2.pg
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23/2014, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pub. L. No. 18/2016, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2016).
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pub. L. No. 95/2018 (2018).
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

.